

**PERAN BINUCA (Bureau Intégré de l'Organisation des Nations Unies en Centrafrique) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH TAHUN 2010-2014**

Oleh:

**Herni Widianti<sup>1</sup>**

**([herni.widianti@gmail.com](mailto:herni.widianti@gmail.com))**

**Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si**

**Bibliografi : 9 Buku, 2 Jurnal, 1 Skripsi, 11 Laporan Resmi, 5**

**Penelitian, 17 Website, 10 Berita**

Jurusan Ilmu Hubungan internasional – Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. HR. Subrantas. KM.12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
28194

Telp. Fax: 0761-63277

***Abstract***

*This research explains about how the BINUCA's roles as international organization to keep peace in Central African Republic (2010-2014). The Rebellion and violent coup made this country fail to protect the security and welfare of civilians even since gaining independence from France in 1960. Central African Republic became weakness of state capacity and authority in many core state function. The worst part is when political conflict turn into ethnic cleansing between Séléka and anti-Balaka.*

*This research used qualitative methods. In this research, the data was collected by using library research technique where this technique is collecting data sources from the literature, like books, website official publications, newspaper, and journal.*

*This research uses pluralism approach which this approach has assumption that actor in international relation isn't just a state but there's another actor one of International organization. In this research, writer uses International Organization Theory which each organization has their duty. This research of BINUCA has important duties and roles to keep peace in Central African Republic.*

*To keep peace in Central African Republic, BINUCA has three roles, political, law and security aspects. Those the most important things at that time to be solved.*

***Keywords: BINUCA, Rebellion, Coup, Genocide, Government, Peace***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2011

## **Pendahuluan**

Republik Afrika Tengah merupakan sebuah *land-locked state* yang berbatasan dengan langsung dengan negara Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo dan Kamerun. Sumber daya alam Republik Afrika Tengah berlimpah akan emas, berlian dan uranium. Namun Republik Afrika Tengah masih berkuat dalam kemiskinan bahkan termasuk yang paling buruk didunia. Diperparah dengan gejolak politik yang tidak pernah usai. Pergantian kepemimpinan di Republik Afrika Tengah selalu menggunakan cara kudeta bahkan sejak awal kemerdekaan di tahun 1960 dari Perancis hingga presiden ke tujuh.

Konflik di Republik Afrika Tengah awalnya adalah konflik politik yang berkembang menjadi konflik etnik dengan usaha pengusiran atau pemusnahan etnik atau agama tertentu

## **Konflik Pemberontakan Terhadap Kepemimpinan Francois Bozize**

Persoalan kemiskinan di negara yang melimpah akan sumber daya mineral ini di perparah ketika Francois Bozize dan pemerintahannya tidak pernah membuat program pembangunan nasional dan pemerintahan yang baik menjadi prioritas. Sebagai kepala negara, dia hanya berkonsentrasi untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan sukunya.

Pada bulan September 2006, aktivitas pemberontak di bagian barat

laut dan timur laut meningkat, sehingga pemerintah kehilangan kontrol.

Aktor yang terlibat konflik dengan pemerintah:

1. APRD (*Armée Populaire pour la restauration de la République et la démocratie*)
2. FDPC (*Front Démocratique Du Peuple Centrafricain*)
3. CPJP (*Convention Des Patriotes Pour La Justice Et La Paix*)
4. UFDR (*Union Des Forces Démocratiques Pour Le Rassemblement*)
5. CPSK (*Convention Patriotique du salut du Kodro*)
6. UFR (*Union des Forces Républicaines*)
7. A2R (*Alliance pour la Renaissance et la Refondation*)

Konflik antara kelompok dan etnik dengan pihak pemerintah yang terjadi di Republik Afrika Tengah mulai mereda ketika para kelompok ini menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah, yakni *The Comprehensive Peace Agreement* yang di tanda tangani di Libreville, Gabon pada 21 Juni 2008. Isi pokok perjanjiannya adalah pemberian amnesti kepada pelaku tindak kejahatan terhadap negara yang terjadi sebelum tahun 2008, menyerukan perlucutan senjata dan proses demobilisasi untuk mengintegrasikan mantan pemberontak ke dalam masyarakat dan megintegrasikan kelompok-kelompok tersebut menjadi satu ke dalam angkatan bersenjata reguler Republik Afrika Tengah. APRD dan

UFDR menandatangani perjanjian tanggal 21 Juni 2008, Mouvement des libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ) pada tanggal 7 Desember 2008, UFR pada tanggal 15 Desember 2008, FDPC pada tanggal 3 Juli 2009. Sedangkan CPJP akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2012, setelah setahun bernegosiasi dengan Pemerintah, menandatangani *The Comprehensive Peace Agreement*.

### **Konflik Seleka dan Anti Balaka serta Genosida**

Konflik memanas kembali pada saat Francois Bozize dan parlemennya kembali memenangkan pemilihan presiden pada Januari 2011. Terdapat indikasi kecurangan dalam pemilihan tersebut. Ditambah lagi proses DDR yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar karena kekurangan dana dan cuaca yang buruk. Anggota kelompok yang telah mengikuti proses DDR dan sebagian yang belum merasa di khianati oleh negara karena melanggar janji-janji yang telah di rundingkan di dalam perjanjian yang mereka sepakati dengan pemerintah.

Pada tahun 2012 tepatnya di 10 Desember, muncul gerakan pemberontak ofensif ketika UFDR menduduki Ndele, Ouadda dan Sam Ouandja. Pasukan UFDR kemudian bergabung dengan tiga gerakan lainnya, yakni Convention patriotique du salut du Kodro (CPSK), CPJP Fondamentale dan Union des forces républicaines (UFR). Kelompok pemberontak

lainnya juga ikut bergabung seperti Democratic Front of the Central African People (FDPC) dan The Alliance for the Rebirth and Rebuilding (A2R). Gerakan-gerakan ini terorganisir dan menamakan diri mereka Séléka.<sup>2</sup>

Seleka melakukan pemberontakan dengan menguasai Ibu Kota pada 24 Maret 2013. Seleka menguasai istana kepresidenan dan Michel Djotodia memproklamkan dirinya sebagai Presiden. Dengan dekrit "Presiden", Konstitusi dihentikan; Majelis Nasional, Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah Persatuan Nasional dibubarkan; dan pengaturan transisi itu diberlakukan. Djotodia juga menunjuk pemerintah baru, Sementara Presiden Francois Bozize akhirnya terpaksa pergi dari negaranya untuk menyelamatkan diri.<sup>3</sup>

Sejak Republik Afrika Tengah dikuasai oleh Seleka, Negara ini mengalami kondisi kekacauan yang parah dengan penjarahan dimana-mana, pembantaian dan pembunuhan terjadi di setiap harinya. lebih dari 173.000 orang telah mengungsi di utara dan utara-timur negara dan selanjutnya sejak dilaporkan dari Bangui dan barat Bangui. Sebanyak 45.000 orang lainnya melarikan diri sejak Desember 2012 sampai April 2013 untuk mencari suaka di

---

<sup>2</sup> Human Right Watch, *Ibid*

<sup>3</sup> Arfi Bambani Amri. Terjadi Kudeta di Afrika Tengah.

<<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/399951-terjadi-kudeta-di-afrika-tengah>>  
(Diakses pada 25 Januari 2015)

Republik Demokratik Kongo (33.127 pengungsi), Chad (6728), Kamerun (1024) dan Republik Kongo (400).<sup>4</sup>

Namun kepemimpinan Michel Djotodia hanya bertahan selama 10 bulan. Pada 10 Januari 2014, dia meninggalkan kantor dan mengundurkan diri dari pemerintahan. Kekosongan kekuasaan langsung diambil alih oleh kelompok pemberontak yang menamakan diri mereka Anti-Balaka.

Anti-Balaka yang berarti "anti-parang" adalah istilah umum yang mengacu pada berbagai kelompok main hakim sendiri yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan pemberontak Séléka, di utara Republik Afrika Tengah yang didominasi oleh Kristen. Anti-Balaka dibentuk pada bulan Agustus tahun 2013 yang disinyalir diciptakan oleh mantan Presiden Bozizé. Saat ini anti-Balaka adalah antara lain terdiri dari Association of Central African Farmers - Asosiasi Petani Afrika Tengah (ACP), Front for the Return of Constitutional Order in Central African Republic - Front Kembali ke Orde Konstitusi di Afrika Tengah (FROCCA)<sup>5</sup> dan Patriotic Youth Movement of Central Africans - Gerakan Pemuda Patriotik Afrika Tengah (MPJCA).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in the Central African Republic on 3 May 2013

<sup>5</sup> TRAC, anti-Balaka <<http://www.trackingterrorism.org/group/anti-balaka>> (Diakses 25 Januari 2015)

<sup>6</sup> Tendai Marima, New Rebel Groups Deepen Security Crisis in Central African Republic. <<http://www.worldpoliticsreview.com/articles/13230/new-rebel-groups-deepen->

Dimata anti-Balaka, Seleka yang mayoritas muslim bertanggung jawab atas pembantaian, eksekusi di luar hukum, pemerkosaan, penyiksaan dan penjarahan, serta pembakaran besar-besaran dan penghancuran desa-desa Kristen dalam kekuasaan 10 bulan Michel Djotodia.

Amnesty Internasional mengatakan bahwa antara 800 dan 1.200 orang tewas di dan sekitar Bangui pada 5 dan 6 Desember.<sup>7</sup>

Komunitas Muslim terpaksa mengungsi, dan ratusan warga sipil muslim yang tidak berhasil melarikan diri telah dibunuh.<sup>8</sup>

Laporan akhir dari penyelidikan yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB pada 19 Desember 2014 menyatakan jumlah korban tewas mencapai 6.000. Namun Komisi menganggap perkiraan tersebut tidak dapat menangkap sebesar apa pembunuhan yang terjadi.<sup>9</sup> Lebih dari seperempat dari populasi Republik Afrika Tengah 4,8 juta telah mengungsi akibat perselisihan.<sup>10</sup>

---

[security-crisis-in-central-african-republic](#) (Dikases pada 16 Februari 2015)

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Human Right Watch, *Ibid*

<sup>9</sup> Winona Amanda "Milisi di Afrika Tengah Dituding Lakukan Genosida" <<http://www.tempo.co/read/news/2015/01/17/119635450/Milisi-di-Afrika-Tengah-Dituding-Lakukan-Genosida>> (Diakses pada 28 Maret 2015)

<sup>10</sup> Krista Larson "AP: More than 5,000 dead in C. African Republic". <<http://bigstory.ap.org/article/ap-more-5000-dead-c-african-republic>> (Diakses pada 28 Maret 2015)

## **Peran Yang Dilakukan Binuca Dalam Membantu Mewujudkan Dan Menjaga Perdamaian Di Republik Afrika Tengah**

BINUCA (*Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine*) BINUCA berdiri sebagai tanggapan atas eskalasi konflik skala tinggi yang terjadi di Republik Afrika Tengah yang berdampak pada instabilitas negara. BINUCA didirikan atas rekomendasi dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon yang termuat di dalam laporannya kepada Presiden Dewan Keamanan tanggal 5 Maret 2009 (S / 2009/128). Secara resmi BINUCA berdiri tanggal 7 April 2009 berdasarkan pernyataan dari Presiden Dewan Keamanan (S / PRST / 2009/5).

### **1. BINUCA Berperan Dalam Dialog Politik Inklusif Antara Pemerintah Republik Afrika Tengah dan Pasukan Pemberontak**

Proses dialog untuk menemukan titik kesepakatan damai sudah dilakukan semenjak BINUCA masih bernama BONUCA. Dialog dilakukan 26 Oktober 2007 di Brussels.<sup>11</sup> Di tahun 2008 tiga kelompok pemberontak menandatangani *The Comprehensive Peace Agreement* di bawah pengawasan President Gabon Omar Bongo. Pemerintah berkomitmen

untuk meningkatkan stabilitas dan mencapai perdamaian, mengadakan amnesty dan program DDR dan SSR.<sup>12</sup> Dialog politik terjadi di bulan Desember 2008 diketuai oleh aktor Pihak Ketiga Pierre Buyoya, mantan Presiden Burundi.<sup>13</sup>

Masalah berlanjut kembali sekitar tahun 2011 dimana Bozizé terpilih kembali dalam pemilu yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Militer Séléka akhirnya mengambil alih dua belas kota dinegara, dan membuat perjanjian perdamaian 2013.<sup>14</sup>

Kepala Negara dan Pemerintah Economic Community of Central African States (ECCAS) yang menunjukk Presiden Kongo, Denis Sasso-Nguesso, sebagai Mediator. Pembicaraan perdamaian ini menghasilkan penandatanganan tiga dokumen pada 11 Januari 2013, yaitu, sebuah deklarasi prinsip-prinsip untuk menyelesaikan krisis politik dan keamanan di Republik Afrika Tengah, gencatan senjata kesepakatan dan kesepakatan politik yang di sebut sebagai "Perjanjian Libreville".

Dewan Mediasi Nasional mengusulkan pembentukan dewan mediasi lokal di Mayoritas wilayah dari 16 prefektur negara untuk memediasi militer, politik, ekonomi dan perselisihan sosial. BINUCA memberikan dukungan finansial kepada unit mediasi melalui dana di luar anggaran. Sampai saat ini, empat

---

<sup>11</sup> UN News Centre, Ban Ki-moon recommends extension of UN office in Central African Republic < <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24964&Cr=central&Cr1=african>> (Diakses pada 28 Januari 2015)

---

<sup>12</sup> Janine Graf, *Conflict Analysis – Central African Republic*. University of Kent

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

dewan mediasi lokal telah didirikan, di Birao (Vakaga prefektur), Bria (Haute-Kotto), Kaga-Bandoro (Nana-Gribizi) dan Ndele (Bamingui-Bangoran). Empat sel tambahan dipertimbangkan untuk menjadi didirikan, di Bouar (prefektur Nana-Mambere), Markounda (Ouham), Obo (Haut-Mbomou) dan Zako (Ouaka).<sup>15</sup>

## 2. Mendukung Peningkatan Tata Kelola Negara di Bidang Peradilan, Proses Pemilihan, Dan Transisi Kepemimpinan

Melanjutkan Dialog Politik Inklusif di tahun 2011, BINUCA dan UNDP terus memberikan bantuan kepada Departemen Kehakiman dalam pelaksanaan strategi nasional, program reformasi peradilan 10 tahun, dan membentuk kelompok kerja aturan hukum. Beberapa seminar dan lokakarya juga telah diadakan.

BINUCA mendukung Departemen Kehakiman dan Moralitas untuk memperkuat kapasitas lembaga peradilan melalui penyediaan saran teknis selama persiapan rencana kerja tahunan dan RUU tentang akses terhadap keadilan dan bantuan hukum. Demi mewujudkan ini BINUCA bekerja sama dengan Uni Eropa dengan peluncuran proyek € 10 juta untuk rehabilitasi sektor keadilan dan polisi.

Dalam resolusi 2031 tahun 2011, BINUCA ikut berperan serta

---

<sup>15</sup> Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in the Central African Republic and on the activities of the United Nations Integrated Peacebuilding Office in that country

dalam upaya mengorganisir pemilihan presiden dan legislatif yang damai di tahun 2011, menyambut pembentukan Komite Peralihan untuk Pemilu pada 14 juli 2011. BINUCA mendukung dengan mengadakan beberapa kali loka karya reformasi pemilu dengan semua pemangku kepentingan nasional pada 28-30 November, 24-27 September.<sup>16</sup>

BINUCA juga memberikan dukungan logistik dan keahlian ke perdamaian Caravan dan rekonsiliasi nasional yang dikunjungi, dari 14-19 November 2011 di tiga prefektur yang terkena dampak bentrokan antara CPJP dan (UFDR).<sup>17</sup>

Di awal tahun 2015 BINUCA mendukung pelaksanaan pemilu sesuai dengan mandat Dewan Keamanan 2121 pada 10 Oktober 2013. Binuca mendukung logistik dan menyertakan ahli pemilu untuk NEA yang menjalani tur di Republik Afrika tengah. NEA adalah badan independen yang bertanggung jawab untuk mengatur pemilihan CAR.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> United Nation Meeting Coverage and Press Release, Security Council Extends Mandate of Peacebuilding Office in Central African Republic until 31 January 2013, Unanimously Adopting Resolution 2031 (2011) <<http://www.un.org/press/en/2011/sc10501.doc.htm>> (Diakses pada 30 Januari 2015)

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> With BINUCA's support, Electoral Authority starts groundwork ahead of elections. <<http://binuca.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5212&ctl=Details&mid=8718&ItemID=2958890&language=en-US>> (Diakses pada 28 Januari 2015)

3. Mengadakan Konferensi Bersama Uni Afrika dan ECCAS Untuk Mengadakan Pusat Operasi Gabungan

BINUCA dan PBB serta ECCAS dan African Union (AU), begitu juga dengan organisasi lainnya sama-sama berusaha untuk mengurangi ketegangan konflik dan mengembalikan keadaan perpolitikan serta keamanan menjadi lebih stabil. Anggota Dewan Keamanan bertemu dengan berbagai unit dalam PBB dan masyarakat sipil dalam pertemuan Arria pada tanggal 1 November yang membicarakan tentang Hak Asasi Manusia dan situasi kemanusiaan di Republik Afrika Tengah yang di pimpin oleh Duta Gérard Araud (Perancis) dan Eugene-Richard Gasana (Rwanda). Peserta yang hadir adalah Adama Dieng yang merupakan Sekretaris Jenderal Penasihat Khusus tentang Pencegahan Genosida, John Ging yang merupakan Direktur Operasional Kantor untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Ivan Simonovic yang merupakan Asisten Sekretaris Jenderal untuk Hak Asasi Manusia dan Brigitte Balipou, seorang ahli hukum dari Republik Afrika Tengah dan aktivis hak asasi manusia.<sup>19</sup>

Dewan Keamanan PBB resmi memberikan wewenang kepada *peacekeeping force* Afrika dan Perancis untuk memadamkan

<sup>19</sup> Security Council Report on December 2013 <[http://www.securitycouncilreport.org/mont-hly-forecast/2013-12/central\\_african\\_republic\\_3.php](http://www.securitycouncilreport.org/mont-hly-forecast/2013-12/central_african_republic_3.php)> (Diakses pada 28 Januari 2015)

kekerasan spiral yang sedang berlangsung pada 5 Desember 2013 berdasarkan resolusi 2127 (2013). Kerusakan total hukum dan ketertiban dan pelanggaran hak asasi manusia yang luas, terutama oleh mantan pemberontak Séléka dan kelompok milisi anti-Balaka, Dewan dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi otorisasi International Support Mission, sebuah pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika (AU) yang dikenal dengan MISCA, serta pengerahan pasukan Perancis untuk membantu.<sup>20</sup>

Direktur Departemen Perdamaian dan Keamanan AU, El Ghassim Wane mengatakan AU melalui MISCA siap menurunkan 6000 pasukan ke Republik Afrika Tengah "tergantung pada kebutuhan". Sedangkan Perancis melalui MINUSCA menurunkan sebanyak 2000 pasukan. Pasukan ditingkatkan menjadi 12.000 ketika bala bantuan pasukan dari Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Maroko dan Banglades bergabung.<sup>21</sup>

4. Mengawasi pelaksanaan Perjanjian Libreville.

Perjanjian Libreville ditandatangani pada 11 Januari 2013

<sup>20</sup> Security Council approves new peacekeeping force for Central African Republic <<http://binuca.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5524&ctl=Details&mid=9443&ItemID=2553660&language=en-US>> (Diakses pada 28 Januari 2015)

<sup>21</sup> UN takes over peacekeeping in Central African Republic <<http://www.theguardian.com/global-development/2014/sep/16/un-peacekeeping-central-african-republic>> (Diakses pada 28 Januari 2015)

di Gabon. BINUCA melaporkan inti dari Perjanjian tersebut meliputi: gencatan senjata, membatasi jangka Bozizé sebagai Presiden sampai akhir mandatnya di 2016 tanpa kemungkinan untuk dipilih kembali, pembentukan pemerintah persatuan nasional dalam dua belas bulan dengan tujuan menyertakan partai mayoritas, partai-partai oposisi, gerakan pemberontak non-aktif, koalisi Séléka, dan masyarakat sipil; pemilu; reformasi pertahanan, keamanan, administrasi teritorial, dan sistem peradilan, DDR dan proses SSR dengan dukungan dari masyarakat internasional; dan berbagai reformasi ekonomi dan sosial.

Pada Maret 2013, Séléka mendesak pemerintahan dengan sebelas tuntutan dan memperingatkan pemerintah apabila dalam waktu 72 jam tidak bisa memenuhi permintaan tersenut maka mereka akan melakukan tindakan militer. Beberapa diantara daftar tuntutan tersebut diantaranya mengefektifkan pelaksanaan perjanjian perdamaian 2013, menarik mundur Afrika Selatan, meninjau kembali jabatan menteri untuk selesa, perlucutan senjata milisi pemerintah dan integrasi lebih dari 2000 pemberontak ke dalam angkatan FACA.<sup>22</sup>

Tidak mampu memenuhi permintaan, akhirnya antara 23 dan 25 Maret 2013, Séléka memasuki

Bangui, mengambil control atas pemerintah dan mengumumkan pemerintahan transisi dengan Djotodia sebagai Presiden.

#### 5. Melaksanakan DDR (Disarmament, Demobilization And Reintegration) bersama UNDP

Proses DDR Tahun 2010:

Proses DDR mulai dilaksanakan di awal tahun 2010. Persiapan DDR berlangsung antara September 2009 dan Mei 2010 di bawah bimbingan Komite Pengarah. Hal ini diikuti oleh kampanye peningkatan kesadaran bagi anggota kelompok bersenjata. Antara Mei dan Juli 2010 daftar kombatan diverifikasi. Anggota dari enam kelompok pemberontak yang sudah di verifikasi berjumlah sekitar 10.600 orang. Hampir 5.000 anggota satu kelompok telah didemobilisasi.

Namun pelaksanaan Perlucutan senjata dan demobilisasi mantan kombatan tidak berjalan dengan mudah. Setelah berkonsultasi dengan menteri yang mengepalai perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi, Menejemen Unit Perlucutan, Demobilisasi dan Reintegrasi UNDP melakukan penarikan program pada 1 Maret 2010. Unit telah memperbaiki kapasitas teknis dan keuangan yang memang harus di aktifkan kembali untuk mendukung Pemerintah jika keadaan menjadi kondusif untuk memulali proses dengan serius.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Siân Herbert, Nathalia Dukhan, and Marielle Debos. State fragility in the Central African Republic: What prompted the 2013 coup?. 2013. Rapid literature review. GSDRC

<sup>23</sup> *Ibid*

Pada 10 Desember 2010, Komite Pengarah Perlucutan, Demobilisasi dan Reintegrasi menyetujui pembentukan Kelompok Kerja Reintegrasi yang memfasilitasi pengembangan strategi nasional untuk reintegrasi mantan kombatan. Kelompok Kerja mengembangkan rancangan strategi reintegrasi nasional yang telah disampaikan kepada Komite Pengarah pada tanggal 22 Februari.

Proses DDR Tahun 2011:<sup>24</sup>

Pada tanggal 13 Januari 2011, Presiden menandatangani sebuah dekrit yang menunjuk enam penasehat teknis perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi untuk presiden: dua dari APRD dan salah satu dari masing-masing kelompok politik-militer lainnya: UFDR, FDPC, MLCJ dan UFR. Pelaksanaan Pelucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi di mulai dari wilayah Utara-Timur.

Pada tanggal 30 April 27,5 % dari Consolidated Appeals Process Republik Afrika Tengah untuk 2011 telah didanai. Awal tahun 2011, dibawah Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat (*Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator*) memberikan dana sebesar \$ 5 juta dari Pusat Tanggap Darurat (*Central Emergency Response Fund*).

---

<sup>24</sup> Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in the Central African Republic and on the activities of the United Nations Integrated Peacebuilding Office in that country on 28 November 2011

Kemajuan yang signifikan dalam proses perlucutan senjata dan demobilisasi mantan kombatan adalah setelah peresmian kegiatan terkait oleh Presiden François Bozizé pada tanggal 25 Juni di utara-barat, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan proses pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi pada akhir 2011. Berdasarkan laporan dewan keamanan tertanggal 28 November 2011, Operasi dimulai di provinsi Ouham-Pende pada 13 Juli dan berakhir pada 11 September. Sekitar 4.777 pejuang APRD, termasuk 350 wanita, yang dilucuti dan didemobilisasi, dan 3.558 senjata dikumpulkan, termasuk 3.491 senjata buatan dan 67 senjata perang.

Pemerintah menyediakan 100.000 CFA franc atau sekitar US \$ 222 untuk masing-masing mantan kombatan dan 270.000 CFA franc atau sekitar US \$ 600 per komandan wilayah, selain kit reintegrasi dan tunjangan transportasi yang disediakan oleh UNDP. Tahap pertama dari proses perlucutan senjata dan demobilisasi ini dilakukan dengan lancar tanpa insiden keamanan yang signifikan. Langkah berikutnya adalah peresmian operasi di Daerah Kaga Bandoro untuk 1.300 kombatan APRD dan 121 pejuang dari Uni des forces républicaines (UFR). Pemerintah telah memberikan kontribusi diperkirakan sekitar US\$ 8,9 juta untuk operasi perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi.

Republik Afrika Tengah terus mengalami kekurangan dalam

persoalan dana. Dari US \$ 139 juta yang dibutuhkan di tahun 2011, hanya US \$ 58 juta telah dimobilisasi pada akhir Oktober 2011. Sektor yang mengalami kekurangan dana antara lain pemulihan awal yang hanya 12% didanai, bantuan multisektoral untuk pengungsi (12%), Perlindungan (19%) dan kesehatan (20%). The Common Humanitarian Fund telah memobilisasi dana ke Republik Afrika Tengah sebesar US \$ 8,2 juta pada tahun 2011, sementara di tahun 2011 sebesar US \$ 11,4 juta.

Secara keseluruhan jumlah dana untuk strategi reintegrasi nasional adalah sekitar US \$ 28 juta, dengan rincian US \$ 8,5 juta untuk kegiatan reinserti dan US \$ 19,5 juta untuk kegiatan reintegrasi. BINUCA dan tim negara PBB bekerja sama dalam memobilisasi sumber daya untuk (a) memperkuat kapasitas mekanisme koordinasi nasional yang baru didirikan untuk reintegrasi, merumuskan program-program reintegrasi dan menggalang dana; dan (b) melaksanakan proyek reinserti yang padat dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Harapan semua pihak bahwa Program pemulihan masyarakat yang didanai oleh World Bank dan program pembangunan yang didanai oleh European Union bisa berjalan dengan bersinergi.

Proses DDR tahun 2012:

Proses Perlucutan, Demobilisasi dan Reintegrasi (DDR) masih terus berjalan di tahun 2012 terhadap mantan pemberontak di Republik Afrika Tengah. Lebih dari 1.000 pejuang APRD yang dipimpin

oleh Jean Jacques Demafouth yang sudah dilucuti persenjataan mulai didemobilisasi pada 12-13 Mei.<sup>25</sup>

APRD mengatakan 1.431 dilucuti mantan kombatan yang didemobilisasi pada 12 Mei di prefektur utara-tengah Nana Gribizi di hadapan Angkatan Bersenjata Afrika Tengah, (FACA), perwakilan dari Misi untuk Konsolidasi Perdamaian Afrika Tengah (MICOPAX), Jean Jacques Demafouth dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden senior dari Komite Pengarah DDR, dan Menteri Perlucutan Republik Afrika Tengah Gen Xavier Sylvestre Yagaongo. Proses ini berlangsung hingga seminggu.

Pada tanggal 12 Mei, kelompok pertama dari 200 mantan kombatan menyerahkan senjata mereka untuk kartu ID demobilisasi. Mereka menerima reinserti kit yang terdiri dari barang-barang rumah tangga yang disediakan oleh pemerintah dan Program Pembangunan PBB (UNDP), dan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setiap orang yang didemobilisasi mendapat 169.300 franc CFA atau 258 Euro. Ex-kombatan dapat memilih antara militer atau kehidupan sipil. Kehidupan sipil berarti bertani, bergabung dengan Pemuda Pelopor Nasional (*National Youth Pioneers*), atau melakukan berbagai keterampilan pelatihan.

---

<sup>25</sup> Central African Republic: DDR moves forward  
<<http://www.irinnews.org/report/95471/central-african-republic-ddr-moves-forward>>  
(Diakses pada 28 Maret 2015)

APRD memiliki 7.000 pejuang, setidaknya 4.000 di antaranya telah dilucuti. Begitu juga dengan kelompok lainnya.

APRD dipimpin oleh Jean-Jacques Demafouth mengikuti proses DDR di daerah Paoua, Bocaranga Bozum, Kaga-Bandoro dan Wandango. UFR yang dipimpin oleh Florian Njadder di wilayah Kabo. FDPC yang dipimpin oleh Abdoulaye Miskine di Kabo dan Sido. Sedangkan kelompok lainnya belum masuk verifikasi dikarenakan kurangnya dana. Kelompok tersebut antara lain UFDR yang dipimpin oleh Zakaria Damane dengan sekitar 4.000 pejuang. MLCJ dipimpin oleh Abakar Sabone dan berbasis di Birao, dengan sekitar 2.000 pejuang.<sup>26</sup>

Krisis dana yang terjadi membuat keadaan proses DDR menjadi buruk dan rentan. Selama proses DDR, dana juga di bantu oleh pemerintahan Luxemburg sebesar \$124,378 dan pemerintahan Australia sebesar \$200.000 pada April 2012 dalam pertemuan "Friends of the Central African Republic" di New York. Pada Juli 2012 dalam ECCAS Summit, ECCAS berjanji menyediakan dana sebesar 5 miliar FCFA atau \$9,87 juta. Pada 13 November Uni Eropa membantu dana sebesar \$3,5 juta.

## 6. Melaksanakan SSR (Security Sector Reform)

BINUCA bersama menteri melakukan pertemuan untuk membahas reformasi sektor keamanan, menetapkan visi nasional dan cara melangkah maju demi perbaikan. Pertemuan tersebut menghasilkan Naskah Persiapan komponen sektor keamanan reformasi strategi pengurangan kemiskinan 2011-2015, juga dikenal sebagai generasi kedua naskah strategi pengurangan kemiskinan, telah menjadi prioritas utama dari kelompok kerja teknis. Namun, terjadi hambatan dalam pelaksanaan naskah tersebut karena kurangnya konsensus baik di tingkat teknis dan politik.

BINUCA juga bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas sektor keamanan dengan mengerahkan ahli internasional untuk mendukung pelayanan yang bertanggung jawab dengan Majelis Nasional dalam mengembangkan strategi sub sektoral di parlemen kendali pasukan keamanan. Strategi ini menyediakan sebuah set prioritas dan merencanakan pelaksanaan selama tiga tahun ke depan. Dokumen ini, bersama-sama dengan Strategi subsectoral lainnya, bisa berfungsi sebagai titik awal untuk pengembangan strategi reformasi sektor keamanan nasional yang dibangun di atas fondasi yang sudah diberlakukan di seminar nasional reformasi sektor keamanan pada April 2008.

---

<sup>26</sup> Briefing: DDR in CAR - hopes and hurdles <<http://www.irinnews.org/report/95321/briefing-ddr-in-car-hopes-and-hurdles>> (Diakses pada 2 Februari 2015)

BINUCA mendukung reformasi sektor keamanan melalui pelatihan dan proyek-proyek praktis lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme polisi, Pasukan bersenjata dan FACA. BINUCA melakukan kegiatan pelatihan untuk Polisi Nasional dan jaksa dalam pengelolaan lalu lintas, komando dan kontrol. BINUCA bersama UNHCR dan FACA gencar mempromosikan etika dan hak manusia dan memberikan pelatihan kepada insinyur militer dan tenaga medis. BINUCA dan Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS) memberikan saran dan dukungan kepada otoritas nasional untuk melaksanakan sebuah proyek yang didanai oleh Peacebuilding Fund yang bertujuan untuk membangun enam barak pertahanan dan pasukan keamanan untuk memastikan bahwa proyek-proyek ini sesuai dengan sektor kerangka reformasi.<sup>27</sup>

Pada Agustus, Menteri Delegasi Pertahanan, yang memimpin Komite Pengarah Reformasi Sektor bersama BINUCA membuat peta dengan jadwal dan batas yang jelas dari peran dan tanggung jawab antara pemangku kepentingan nasional.

Pada pertengahan 2011, Menteri Republik Afrika Tengah untuk Delegasi Pertahanan resmi meminta Wakil Khusus Sekretaris Jenderal (SRSG) dari BINUCA untuk mendukung penjabaran strategi SSR nasional. Menanggapi permintaan ini,

SIU (*Security Institutions Unit*) menyusun peta untuk persiapan strategi SSR nasional, yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Afrika Tengah pada pertengahan Februari 2012. Peta ini di sebut revitalisasi SSR melalui pengembangan enam sub-sektoral strategi, yang akan dilakukan secara bersama-sama untuk membentuk tiga tahun strategi nasional SSR. Keenam sub-sektor berpadu dengan visi menyeluruh diadopsi oleh Pemerintah pada bulan April 2008 dan termasuk polisi, keadilan, tentara dan gendarmerie, keuangan publik dan perbatasan, desentralisasi dan perlindungan lingkungan, dan kontrol demokratis.<sup>28</sup>

Dengan dukungan teknis dan keuangan dari Unit SSR, BINUCA memberikan bantuan dengan mengirimkan ahli untuk membantu Pemerintah mengelaborasi empat dari enam strategi. Seorang ahli dari Unit SSR di kirim ke Bangji pada akhir Maret. Tim unit SSR juga menyebarkan di lokasi-lokasi Republik Afrika Tengah dengan tujuan untuk mendukung SIU dalam upaya membantu Pemerintah dengan merevisi dan elaborasi strategi sub-sektor kontrol demokratis dari sektor keamanan dan di kepolisian untuk memfasilitasi persiapan pengembangan strategi SSR nasional dan memperkuat kemitraan dengan Uni Afrika dengan memastikan keselarasan antara strategi Republik

---

<sup>27</sup> *Ibid*

---

<sup>28</sup> SSR Newsletter, Spotlight on a Mission: Reinvigorating SSR in the Central African Republic. Number 13. January-March 2012

Afrika Tengah dan kerangka rencana kebijakan Uni Afrika.<sup>29</sup>

SIU melakukan lokakarya selama tiga hari untuk memperkenalkan SSR di Sekolah Polisi untuk Tugas Polisi Senior atas permintaan Menteri Keamanan Publik. SIU juga menyediakan perangkat teknis untuk elaborasi dari undang-undang baru kepada Satpol PP, mendukung masyarakat untuk memahami peran dan tanggung jawab Satpol PP dan memberikan pelatihan tentang kekerasan seksual dan pengetahuan berbasis gender dan tentang perpolisian.<sup>30</sup>

BINUCA memberikan pinjaman perangkat computer ke pusat Sekolah Polisi Nasional yang diresmikan pada November 2011. Selain itu juga memberikan saran teknis pada kurikulum pelatihan Kepolisian. Begitu juga dengan tentara yang mendapatkan pelatihan sederhana di bidang militer, bantuan medis darurat dan komunikasi serta beberapa dukungan keuangan untuk pemulihan infrastruktur militer termasuk kelas militer, pusat medis dadrurat dan asrama.<sup>31</sup>

Di bidang reformasi sektor keamanan (SSR), peta jalan baru yang diadopsi pada pertengahan Februari 2012 oleh Komite Pengarah SSR nasional, dan dikembangkan dengan dukungan teknis dari BINUCA, menandai kebangkitan proses SSR di Republik Afrika Tengah. Visi elaborasi enam strategi sub-sektoral,

yang akan dikonsolidasikan ke dalam tiga tahun strategi nasional SSR. Strategi sub-sektoral di FACA / gendarmerie baru-baru ini selesai dan telah disetujui oleh Departemen Pertahanan. Sebuah draft awal dari strategi sub-sektor di polisi telah selesai dan akan direvisi. Strategi sub-sektoral pada kontrol demokratis atas sektor keamanan, selesai pada bulan Januari 2011, sedang diperbarui. Penyusunan strategi sub-sektor di sektor peradilan saat ini berlangsung. Tambahan dana dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang keuangan publik dan adat istiadat, dan desentralisasi dan perlindungan lingkungan. Penyelesaian strategi reformasi sektor keamanan nasional yang luas akan menjadi langkah maju yang penting dan harus membantu memfokuskan upaya nasional dan internasional di daerah vital ini.<sup>32</sup>

### **Perkembangan Peran BINUCA**

Dalam melaksanakan tugasnya BINUCA mengalami gelombang penurunan. BINUCA sempat mengevakuasi staff nya ketika penyerangan seleka di 24 maret 2013. Karena evakuasi tersebut BINUCA sempat vakum beberapa waktu. ECCAS mengambil tugas penyelamatan melalui MICOPAX. Begitu juga dengan AU melalui MISCA. Berdasarkan konferensi dengan Dewan Keamanan pada

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

---

<sup>32</sup> Briefing to the Security Council on the Seventh Report of the Secretary-General on the situation in the Central African Republic CAR and on the Activities of BINUCA, New York, 06 June 2012.

tanggal 8 Juli di Addis Ababa, dengan perwakilan dari 23 negara dan tujuh organisasi internasional yang berpartisipasi akhirnya sepakat untuk mengubah kedua badan tersebut menjadi AFISM-CAR di bawah mandat PBB.<sup>33</sup>

Meskipun resolusi peran BINUCA ditingkatkan (berdasarkan resolusi 2121), namun anggota Dewan sangat menyadari bahwa saat ini situasi keamanan di lapangan tidak mengizinkan BINUCA untuk melaksanakan mandatnya. Untuk mengatasi masalah ini, Dewan menyetujui, melalui pertukaran surat rekomendasi untuk mengirim 250 personel militer untuk menjaga personel BINUCA.

Perubahan misi BINUCA yang terdapat dalam resolusi nomor 2121 ini juga mempertimbangkan bahwa sepertinya yang lebih di butuhkan adalah *peacekeeping force* di bandingkan dengan *peacebuilding*.

### Simpulan

BINUCA merupakan organisasi yang memang di bentuk untuk melaksanakan tugas menjaga perdamaian di Republik Afrika Tengah atas rekomendasi Sekretaris Jenderal PBB kepada Dewan Keamanan PBB. Sejak di bentuk tahun 2009 hingga berhenti mandatnya berhenti di tahun 2014, BINUCA telah menjalankan banyak program yang membantu memulihkan stabilitas negara. BINUCA melaksanakan misi perdamaian

dengan beberapa kali mengadakan dialog politik inklusif antara pemerintah dan kelompok pemberontak, mengadakan lokakarya untuk edukasi para staf pemerintahan, pengadilan, polisi, melakukan transisi pemerintahan dengan reformasi kode etik pemilu, melaksanakan DDR dan SSR. Semua ini berjalan dengan baik sampai akhirnya di tahun 2013 konflik pecah kembali antara pihak pemberontak dan pemerintah. Disini terlihat seperti pihak pemerintah yang pada waktu itu di pimpin oleh Bozize tidak berkomitmen untuk melaksanakan hasil dialog politik inklusif dan memang terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya yakni cuaca dan dana. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh BINUCA semuanya berjalan namun belum berhasil untuk mengembalikan stabilitas negara.

### Daftar Pustaka

- Human Right Watch. *"I Can Still Smell the Dead" The Forgotten Human Rights Crisis in the Central African Republic*. USA, 2013
- Spittaels, Steven & Filip Hilgert. *Mapping Conflict Motives: Central African Republic*. Antwerp: IPIS, 2009
- Janine Graf, Conflict Analysis – Central African Republic. University of Kent
- Siân Herbert, Nathalia Dukhan, and Marielle Debos. State fragility in the Central African Republic: What prompted the 2013 coup?.

<sup>33</sup> Security Council Report on Desember 2013, *Ibid*

2013. Rapid literature review. GSDRC
- SSR Newsletter, Spotlight on a Mission: Reinvigorating SSR in the Central African Republic. Number 13. January-March 2012
- Briefing to the Security Council on the Seventh Report of the Secretary-General on the situation in the Central African Republic CAR and on the Activities of BINUCA, New York, 06 June 2012
- Security Council Report, S/2011/241, S/2011/311, S/2013/261, S/2011/739, S/2013/787
- TRAC, anti-Balaka <<http://www.trackingterrorism.org/group/anti-balaka>>
- Tendai Marima, New Rebel Groups Deepen Security Crisis in Central African Republic. <<http://www.worldpoliticsreview.com/articles/13230/new-rebel-groups-deepen-security-crisis-in-central-african-republic>>
- Winona Amanda “Milisi di Afrika Tengah Dituding Lakukan Genosida” <<http://www.tempo.co/read/news/2015/01/17/119635450/Milisi-di-Afrika-Tengah-Dituding-Lakukan-Genosida>>
- UN News Centre, Ban Ki-moon recommends extension of UN office in Central African Republic <<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24964&Cr=central&Cr1=african>>
- With BINUCA’s support, Electoral Authority starts groundwork ahead of elections. <<http://binuca.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5212&ctl=Details&mid=8718&ItemID=2958890&language=en-US>>
- Security Council approves new peacekeeping force for Central African Republic <<http://binuca.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5524&ctl=Details&mid=9443&ItemID=2553660&language=en-US>>
- UN takes over peacekeeping in Central African Republic <<http://www.theguardian.com/global-development/2014/sep/16/un-peacekeeping-central-african-republic>>
- Central African Republic: DDR moves forward <<http://www.irinnews.org/report/95471/central-african-republic-ddr-moves-forward>>
- Briefing: DDR in CAR - hopes and hurdles <<http://www.irinnews.org/report/95321/briefing-ddr-in-car-hopes-and-hurdles>>